

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang secara berkala mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin nasional dan daerah. Buku yang dirilis oleh KPU mengenai Indeks Partisipasi Pemilu 2024 menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam pemilu merupakan salah satu hak warga negara untuk berperan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi sangat penting, terutama sebagai indikator kualitas demokrasi suatu negara. Tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi mereka dalam proses politik dan pemerintahan.

Berdasarkan data KPU yang dimuat dalam Statistik Politik 2023, tingkat partisipasi pemilih Provinsi Jawa Tengah pada Pilpres 2019 hanya mencapai 80,21%, berada di bawah rata-rata nasional sebesar 81,97% dan menempatkannya pada peringkat ke-28 dari 34 provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi pemilih di Jawa Tengah pada periode tersebut tergolong rendah dibandingkan provinsi lain.

Menurut data KPU dalam publikasi Indeks Partisipasi Pemilu Tahun 2024, partisipasi di Jawa Tengah pada Pilpres 2024 meningkat menjadi 82,56% dan melampaui rata-rata nasional (81,48%). Namun, hal ini belum menunjukkan perbaikan secara drastis karena masih menempatkan Provinsi Jawa Tengah di peringkat ke-20 dari 38 provinsi, atau masih berada di paruh bawah secara nasional.

Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar ketiga di Indonesia, posisi ini menunjukkan bahwa potensi partisipasi masyarakatnya belum termobilisasi secara optimal. Selain itu, masih terdapat masalah kesenjangan di antara satu wilayah dengan wilayah lain. Misalnya, di Kota Salatiga tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 mencapai 90,7%, sangat berbanding jauh dengan Kabupaten Pemalang yang memiliki tingkat partisipasi terendah di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 74,5%.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu sering kali disebabkan oleh faktor eksternal, termasuk faktor sosial ekonomi seperti pendidikan, pendapatan serta kemudahan memperoleh informasi politik. Menurut Astrawan *et al.* (2014) sosial ekonomi mengacu pada kedudukan individu dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh aktivitas ekonomi, pendapatan, dan pendidikan. Kesenjangan dan rendahnya partisipasi masyarakat ini menjadi tantangan yang serius bagi beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah, yang penduduknya memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang sangat beragam. Variasi dalam faktor-faktor sosial ekonomi ini menjadi relevan untuk dianalisis karena berpotensi memengaruhi minat dan kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu di tiap daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan keterlibatan politik masyarakat. Beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan dan pendapatan, cenderung berhubungan positif dengan partisipasi pemilih. Penduduk berpendidikan tinggi umumnya memiliki literasi politik dan akses informasi lebih baik, sehingga lebih terdorong untuk memilih (Kurnia *et al.*, 2025; Yoon, 2017). Sejalan dengan itu, teori *Civic Voluntarism* (Verba *et al.*, 1995)

menjelaskan bahwa individu dengan pendapatan lebih tinggi memiliki sumber daya (waktu, uang, dan keterampilan) yang memudahkan keterlibatan dalam aktivitas politik.

Pengaruh faktor kemiskinan dan pengangguran menunjukkan hasil yang lebih kompleks. Beberapa penelitian menegaskan bahwa kemiskinan dan pengangguran dapat menurunkan partisipasi politik. Schaub (2021) menemukan bahwa kesulitan keuangan dapat melemahkan niat seseorang untuk ikut memilih dalam kegiatan pemilu. Menurut Elder *et al.* (2024), tekanan ekonomi mengurangi kepercayaan politik dan memperbesar risiko apatisme warga. Penelitian Aytaç *et al.* (2020) juga menunjukkan bahwa pengalaman menganggur dapat memicu rasa malu, depresi, dan penarikan diri, yang pada akhirnya menekan partisipasi pemilih. Sebaliknya, penelitian Carreras dan Castañeda (2016) justru menemukan bahwa kondisi sulit tersebut dapat mendorong partisipasi politik, karena menjadikan pemilu sebagai bentuk protes dan tuntutan perubahan kebijakan. Perbedaan temuan ini memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam literatur mengenai pengaruh aspek ekonomi khususnya kemiskinan dan pengangguran terhadap partisipasi pemilih.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengidentifikasi lebih lanjut faktor-faktor sosial ekonomi yang berpotensi menghambat maupun mendorong partisipasi pemilih di setiap wilayah di Jawa Tengah. Hasil identifikasi ini akan membantu pemerintah daerah dan KPU dalam memahami karakteristik dan segmentasi masyarakat, sehingga dapat merumuskan kebijakan serta strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan partisipasi pemilih di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Perbedaan karakteristik antardaerah menyebabkan keragaman partisipasi pemilih, sehingga diperlukan metode untuk mengidentifikasi segmentasi daerah secara akurat. Pendekatan yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut adalah metode pengelompokan data (*clustering*). Prinsip utama *clustering* adalah memaksimalkan kemiripan data di dalam kelompok dan memaksimalkan perbedaan data antarkelompok. Terdapat beberapa macam metode *clustering* yaitu *Partitional Clustering* seperti *Hierarchical Clustering*, *K-Means*, *Density-Based Clustering*, dan *Grid-Based Clustering* (Irwansyah dan Faisal, 2015).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode *clustering* sering digunakan untuk mengidentifikasi pola dan pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik tertentu. Fadhilurrohman (2021) menggunakan *Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise* (DBSCAN) untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan partisipasi pemilu legislatif. Sebagai metode *clustering* konvensional, DBSCAN memiliki keterbatasan, yaitu hanya menghasilkan kelompok tanpa memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Selain itu, performa DBSCAN melemah ketika berhadapan dengan variasi kepadatan *cluster* yang signifikan (Preim, 2023). Metode ini juga hanya menghasilkan label *cluster* diskrit sehingga tidak memberikan informasi mengenai derajat keanggotaan (Ester *et al.*, 2020).

Keterbatasan metode *clustering* konvensional dapat diatasi dengan penerapan metode *clusterwise regression* yang mampu melakukan pengelompokan sekaligus analisis regresi. Salah satu variannya adalah *Fuzzy Clusterwise Regression* (FCR), yang menawarkan fleksibilitas lebih besar karena suatu data dapat memiliki derajat keanggotaan pada lebih dari satu *cluster* (Gath dan Geva, 1989). Namun metode

FCR memiliki kelemahan, yakni sensitif terhadap pencilan (*outlier*) dan *noise*. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan probabilistik pada fungsi keanggotaan *fuzzy*, yang memaksa total keanggotaan setiap data bernilai satu. Akibatnya, objek pencilan tetap memperoleh keanggotaan signifikan pada *cluster* tertentu, sehingga berpotensi mendistorsi estimasi parameter regresi maupun pusat *cluster* (Krishnapuram dan Keller, 1993).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Possibilistic Clusterwise Regression* (PCR) sebagai pengembangan dari FCR. Keunggulan utama PCR terletak pada ketangguhannya (*robustness*) terhadap *noise* dan *outlier*, karena menggunakan konsep derajat tipikalitas (*typicality*) sebagai pengganti keanggotaan *fuzzy*. Pendekatan tersebut memungkinkan data pencilan teridentifikasi sebagai objek dengan tipikalitas rendah tanpa harus dipaksakan masuk ke dalam suatu *cluster*. Hal ini membuat PCR mampu menghasilkan pengelompokan dan pemodelan regresi yang lebih akurat dan andal (Kung *et al.*, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi pemilih di Jawa Tengah dengan menggunakan metode PCR. Metode ini memungkinkan untuk analisis hubungan linier antara variabel dependen dan independen sekaligus mendeteksi *cluster* yang menunjukkan pola hubungan berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Jawa Tengah dalam kaitannya mengenai variabel-variabel sosial ekonomi yang berdampak pada tingkat partisipasi pemilih, serta memberikan landasan strategis bagi KPU Provinsi Jawa Tengah untuk merancang program peningkatan partisipasi pemilih yang efektif dan tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan jumlah *cluster* optimal dan mengelompokkan anggota setiap *cluster* yang dicirikan dengan model regresi linier yang berbeda-beda di setiap *cluster* menggunakan PCR?
2. Bagaimana profil karakteristik setiap *cluster* yang terbentuk?
3. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita disesuaikan, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat partisipasi pemilih pada setiap *cluster* yang terbentuk?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penulis membatasi penelitian ini pada metode dan variabel data yang digunakan dalam analisis. Penelitian ini berfokus pada pengelompokan wilayah sekaligus analisis pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi pemilih di setiap cluster menggunakan metode *Possibilistic Clusterwise Regression* (PCR). Penelitian ini tidak ditujukan untuk melakukan prediksi tingkat partisipasi pemilih di masa mendatang, melainkan untuk memperoleh pemahaman mengenai pola dan variasi pengaruh faktor sosial ekonomi antarwilayah. Variabel penelitian mencakup empat variabel independen dan satu variabel dependen. Data yang digunakan meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Memperoleh banyaknya *cluster* optimal dan mengelompokkan anggota setiap *cluster* yang dicirikan dengan model regresi linier berbeda-beda di setiap *cluster* menggunakan PCR.
2. Mengetahui profil karakteristik setiap *cluster* yang terbentuk.
3. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita disesuaikan, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat partisipasi pemilih pada setiap *cluster* yang terbentuk.